

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

*Human trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang hingga saat ini masih terjadi didalam masyarakat internasional bahkan nasional, dengan tindakan yang melanggar norma dan hak asasi manusia. Dari tahun ketahun seiring berjalannya waktu terus-menerus meningkat sehingga korban menjadi lebih banyak, bagi semua negara internasional dengan adanya permasalahan ini menjadi terancamnya keamanan disetiap negaranya. *Human Trafficking* juga merupakan masalah yang sangat besar tetapi tidak memungkinkan untuk mengukur cakupannya karena sangat banyak kejadian yang juga tidak langsung dilaporkan. 1,2 juta dari 2,45 juta orang yang menjadi korban perdagangan manusia saat ini adalah anak di bawah umur di bawah 18 tahun. Masalah signifikan dalam skala global, perdagangan manusia mempengaruhi sekitar 27 juta orang dan berdampak pada pembangunan sosial dan hak asasi manusia, perdagangan manusia berdampak pada pria, wanita, dan anak-anak dalam semua manifestasinya. (Kim Anh Duong, 2018).

Salah satu kejahatan yang masih berdampingan dengan kemajuan teknologi modern adalah *human trafficking* terutama yang melibatkan anak-anak. Eksploitasi terhadap korban dilakukan melalui penggunaan berbagai sarana dengan cara, termasuk pemaksaan dalam perdagangan seks serta kerja paksa dan perbudakan. Korban dipaksa dan diancam dengan kekerasan dalam semua situasi ini. Aktivitas perdagangan anak ini bahkan tidak berhenti pada saat pandemi dengan menggunakan teknik penjualan online. *Human trafficking*

merupakan sebuah persoalan kriminalitas tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. *Human trafficking* salah satu bentuk dari kejahatan permudakan modern seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi maka modus *human trafficking* yang terjadi semakin canggih dengan bersistem seiring berjalannya waktu.

Isu kejahatan ini juga sangat sulit untuk dilesaikan karena termasuk permasalahan yang kompleks, sehingga masyarakat internasional menyebut kejahatan ini sebagai perbudakan dan tentunya masuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu penyebab munculnya *human trafficking* ini karena rendahnya tingkat ekonomi, Pendidikan, dan situasi psikologis. (fandy, 2014). Dalam sejarahnya kasus *human trafficking* sangat sulit untuk diselesaikan dan diidentifikasi, dengan melibatkan sindikiat yang berpengalaman dalam hal ini sehingga sangat sulit diatasi dengan cara yang biasa, oleh karena itu dalam menangani kasus *human trafficking* harus dimulai dengan mencari sebuah akar permasalahannya karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya dan tepat terkait cakupan perdangan manusia dan profil pada korban merupakan salah satu kendala utama dalam membuat respons anti-perdangan manusia yang terfokus dan mengevaluasi dampaknya (Portal, 2021).

Secara khusus dalam kasus *human trafficking* ini, perempuan dan anak lebih sering mengalami ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, layanan dan kesempatan. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lima puluh satu persen korban adalah perempuan, dan hampir sepertiganya adalah anak-anak. *Human trafficking* : “*The crime of human trafficking is against humanity. A person is recruited, moved, transferred, harbored, or received with the intent to employ them for personal gain by using*

*coercion, force, or other means.*” UNODC mendefinisikan human trafficking :  
“Kejahatan perdagangan manusia bertentangan dengan kemanusiaan. Kegiatan yang dilakukan seseorang dengan direkrut, dipindahkan, ditampung, atau diterima dengan maksud mempekerjakannya untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan kekerasan, paksaan, untuk mengeksploitasi mereka.” (*Faculty of Social and Political Sciences The 9 Th International Scientific Conference “ Space , Society , Politic S ,”* 2021).

Vietnam adalah negara kecil di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Cina, Laos, dan Kamboja baik di darat maupun di perairan. Vietnam adalah negara terpadat ketiga belas di dunia dan diperkirakan memiliki 86,5 juta penduduk yang tinggal di area seluas 331.114 km persegi, menjadikannya enam kali lebih padat dari rata-rata global. Di Kawasan Asia Tenggara sendiri merupakan sumber utama perdagangan manusia, menjadi salah satu Kawasan dengan yang tercatat isu *human trafficking* tertinggi. Vietnam dengan negara lain di *Greater Mekong Sub-Region* (GMS), dalam menangani masalah *human trafficking* yang terus meningkat pemerintah Vietnam menetapkan kebijakan multidimensi dan multisektoral, antara lain berupa *Vietnam National Action Program Against Trafficking in Women and Children 2004-2010* (VNAP). VNAP sendiri bertujuan untuk mencegah kejahatan, menghukum pelaku, dan mengintegrasikan kembali korban ke dalam masyarakat. (Kim Anh Duong, 2018). Menurut data “*Trafficking In Person Report 2022*” dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai kondisi perdagangan manusia, semakin banyak negara di Asia Tenggara yang menjadi tempat untuk kejahatan perdagangan manusia karena penegakan hukum yang lemah dan korupsi yang merajalela. Menurut penelitian tersebut, setengah dari sepuluh anggota ASEAN

termasuk dalam kategori terburuk dalam menangani kasus perdagangan manusia (tier 2). Negara-negara tersebut adalah Kamboja, Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan Brunei Darussalam (SUSILO, 2023).

Vietnam diturunkan ke Tier tiga karena pemerintah Vietnam tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan minimal untuk penghapusan *human trafficking* dan hanya melakukan sedikit upaya untuk melakukannya, bahkan mengingat dampak pandemi COVID-19 terhadap kemampuan anti-perdagangan manusia. Pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk memerangi *human trafficking* meskipun hanya melakukan sedikit atau bahkan tanpa usaha, termasuk menetapkan kebijakan investigasi formal yang berpusat pada anak untuk mengatasi kesenjangan yang sudah lama ada dalam undang-undang, meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum internasional, memulai proses untuk menilai anti-amandemen undang-undang *human trafficking*, mencapai peningkatan sederhana pertama dalam identifikasi korban dalam lima tahun dan membantu lebih banyak korban dibandingkan tahun sebelumnya. (U.S. DEPARTMENT of STATE, 2022)

Dilihat dari maraknya tindakakan pidana memperdagangkan manusia di Vietnam menjadikan Vietnam sebagai negara yang menjadi objek para pelaku kejahatan, dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di Vietnam hal itu mempermudah pelaku untuk bertindak kejahatan *human trafficking*, dengan sebuah iming-iming memberikan pekerjaan yang memungkinkan tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya, berdasarkan buktinya korban *human trafficking* ini adalah perempuan dan anak-anak dengan diperjual belikan hingga kenegara internasional. Tahun 2020 menurut data UN Women Kawasan Asia

Tenggara menjadi Kawasan yang rentan untuk aktivitas perdagangan khususnya pada perempuan dan anak-anak dengan terdapat sekitar 225.000 yang di perdagangkan. (Riyadi, 2022)

Kementerian Keamanan Publik (MPS) pada tahun 2021 merilis kebijakan baru untuk menguraikan prosedur yang bertujuan pada anak untuk menyelidiki kejahatan perdagangan manusia yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Pada tahun 2021 pemerintah memeriksa lebih banyak tersangka pelaku perdagangan manusia, tetapi lebih sedikit orang yang dihukum dan dinyatakan bersalah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah kembali memberikan penegakan hukum dengan data yang dirinci menurut jenis perdagangan manusia, terlepas dari kesulitan yang disebabkan oleh pandemi. MPS melaporkan bahwa pada tahun 2021, petugas memeriksa 79 kasus yang melibatkan 149 tersangka pelaku perdagangan manusia (dibandingkan dengan 144 tersangka pelaku perdagangan manusia yang diselidiki dalam 110 kasus pada tahun 2020). Dibandingkan dengan 106 kasus yang melibatkan 180 tersangka yang diajukan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 secara resmi diidentifikasi ada 4.550 anak-anak dan meningkat 45% dari tahun sebelumnya sebagai korban perbudakan modern dan perdagangan manusia.

Terdapat beberapa sebab mengapa kasus human trafficking terjadi di dalam negara vietnam, salah satunya karena faktor ekonomi dengan timbul rasa keinginan untuk terlepas dari kemiskinan, kurangnya sikap negara dengan mengabaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat tetapi faktor kemiskinan ini menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang paling dominan, sebab bisa terjadi adanya child trafficking juga rendahnya pendidikan. Alasan kenapa vietnam menjadi negara yang sangat rawan akan

masalah perdagangan ini juga karena yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya pertama karena kemiskinan, kedua adanya permasalahan yang muncul dalam keluarga, ketiga kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keempat bisa juga terjadi karena pengaruh lingkungan sekitar.

Seperti yang telah didokumentasikan selama lima tahun terakhir, para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan baik korban lokal maupun asing di Vietnam serta korban Vietnam di luar negeri. Para korban di Vietnam secara formal pergi ke luar negeri untuk bekerja, baik melalui perusahaan perekrutan tenaga kerja milik negara atau yang diatur oleh negara pada jaringan perantara rahasia yang dijalankan oleh orang Vietnam lain yang tinggal di luar negeri. Pelaku perdagangan menggunakan korban mereka sebagai kerja paksa, terutama di Malaysia, Korea Selatan, Laos, Jepang, dan pada tingkat yang lebih rendah di wilayah tertentu di Timur Tengah, Eropa, dan Inggris, termasuk di salon kuku dan di perkebunan ganja, di konstruksi, pertanian, pertambangan, industri maritim, penebangan, dan manufaktur. Di Taiwan, Eropa, Timur Tengah, dan industri maritim Pasifik, termasuk di kapal penangkap ikan Indonesia dan Taiwan yang beroperasi di bawah pengaturan kepemilikan dan memungkinkan pedagang untuk menghindari deteksi dan intervensi oleh penegak hukum, itu mejadikan jumlah peningkatan korban perdagangan tenaga kerja Vietnam. (U.S. DEPARTMENT of STATE, 2022)

Dalam isu human trafficking ini diperlukannya juga aktor non-negara seperti organisasi internasional yang harus mengambil peran bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu *End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking of Children for Sexual Purpose* (ECPAT) dengan adanya aktor non-negara ini bekerja untuk bagaimana menghentikan

prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak dalam permasalahan eksploitasi seksual, yang bekerja sama dengan jaringan global afiliasi independen dan individu di seluruh dunia. (May, 2014). Terdapat beberapa kelompok di seluruh negara sehingga saat ini mencapai 122 kelompok di 104 negara, ECPAT juga memiliki kelompok yang beragam mulai dari kelompok besar yaitu *Non-Governmental Organization* (NGO) dengan perannya untuk memberikan Pendidikan serta membangun kesadaran masyarakat, menjadi pendamping bagi masyarakat. Beberapa anggota fokus pada satu bidang yaitu Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), sementara yang lain berkonsentrasi pada tindakan yang mencakup beragam topik terkait (ecpat, 2022).

Salah satu aktor *non-pemerintah Vietnam Association for Protection of Child's Right* (VACR) bekerja untuk melindungi hak-hak anak. Dengan tujuannya untuk mengumpulkan orang-orang dan organisasi Vietnam yang secara sukarela berjuang untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke semua hak dasar. Terdapat enam tanggung jawab utama VACR adalah sebagai dengan mempromosikan advokasi dan menawarkan konsultasi untuk meningkatkan kapasitas perlindungan anak, ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hak anak, merumuskan serta melaksanakan dan sebuah proyek untuk melindungi anak, melakukan penelitian kolaboratif dan berbagi pengetahuan juga pengalaman, memobilisasi suara dan partisipasi anak, dan bertindak sebagai titik fokus antara INGO, CSO, dan lembaga GO (ECPAT Vietnam, 2008).

Salah satu Program Perlindungan Daring Anak Nasional pertama untuk tahun 2021–2025 dikembangkan oleh pemerintah Vietnam dengan tujuan

melindungi anak-anak dari pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan daring dan membantu mereka terlibat dalam interaksi daring yang aman dan konstruktif. Sebagai bagian dari program baru ini, pemerintah Vietnam akan bekerja sama secara erat dengan sektor TIK untuk mengikuti laju pembangunan, melindungi anak-anak dari bahaya dan bahaya baru yang mereka hadapi, dan memastikan Internet selalu aman untuk anak-anak. Program ini juga bertujuan untuk memberi anak-anak dan remaja pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri, dapat melindungi diri mereka sendiri secara online dan memanfaatkan peluang luar biasa yang ditawarkan dunia digital. Pemerintah berkomitmen untuk membuat undang-undang, kebijakan, praktik, dan produk melalui program ini yang dapat melindungi dan memungkinkan anak-anak mendapatkan keuntungan dari peluang online. (UNICEF, 2021)

Sebelumnya sebuah undang-undang khusus yang lengkap untuk melarang perdagangan perempuan, anak-anak, dan imigran ilegal masih kurang di Vietnam pada tahun 2010. Tetapi salah satu undang-undang Vietnam yaitu Law No. 66/2011/QH12, menguraikan strategi Pemerintah Vietnam untuk mencegah dan menyelesaikan perdagangan manusia yang terjadi di negaranya dan Undang-undang nasional Vietnam tentang perdagangan manusia baru saja disahkan pada tahun 2012. Pemerintah Vietnam telah berkolaborasi dan menyetujui sejumlah perjanjian mengenai keamanan manusia dan pembelaan hak asasi manusia internasional. Pemerintah Vietnam juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dan negara-negara ASEAN untuk mengatasi permasalahan *human trafficking* yang kini terjadi di Vietnam. Undang-undang yang berlaku di Vietnam dan apa yang disebut surat-surat di bawah undang-



undang tersebut mengatur perdagangan manusia pada wanita dan anak-anak selama periode VNAP. (Kim Anh Duong, 2018).

Perdagangan manusia tidak berhenti pada masa pandemic maka dari itu semakin banyak orang yang berisiko akibat pandemi, pelaku perdagangan manusia dapat memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan keuntungan mereka, dan sumber daya dialihkan ke operasi tanggap pandemi, seperti itu perdagangan orang terus berlanjut selama ini (STATE, 2021b). *Online Child Sexual Exploitation* (OCSE) kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan teknologi informasi internet sebagai medianya hal itu semakin menjadi masalah di Vietnam. Biasanya anak-anak dari daerah pedesaan dan terpencil menjadi sasaran pelaku terhadap perdagangan, dan Vietnam juga merupakan negara pemasok bagi anak-anak yang dipaksa menjadi pelacur. Karena ekspansi sektor pariwisata yang luar biasa, Vietnam dengan cepat berkembang menjadi lokasi utama bagi pelaku *Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism* (SECTT). *Committee on the Rights of the Child* (CRC) telah menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya jumlah anak yang diperdagangkan di Vietnam, yang terdaftar sebagai negara sumber bagi korban perdagangan anak-anak untuk seksual oleh *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Departemen Luar Negeri AS. UNICEF dan *Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs* (MOLISA) juga telah menekankan bahwa biasanya para pengeksploitasi sering menggunakan berbagai taktik curang, mereka kadang-kadang beralih ke tindakan ekstrem termasuk penculikan dan penggunaan obat bius. (ECPAT, 2018)

Dengan adanya internet yang perkembangannya sangat pesat bahkan saat ini sekalipun internet digunakan untuk kejahatan perdagangan manusia,

kekerasan seksual, dan eksploitasi anak. Seorang pelaku yang menggunakan Internet dan ketersediaan individu yang berpikiran sama telah menjadikannya tempat yang populer bagi para pedagang dan kolektor pornografi anak untuk berkumpul (Westlake, 2011). Dalam kasus ini terjadi juga sebuah efektivitas uji tuntas perusahaan dalam memerangi *human trafficking*, saat ini karena kejahatan ini merupakan produk sampingan dari sistem masyarakat tingkat makro yang didirikan dan menjadi bagian dari banyak pelaku termasuk perusahaan. Karena keputusan dan taktik perusahaan memungkinkan adanya kondisi yang memfasilitasi perdagangan dalam rantai pasokan dan bisnis yang menjadi tanggung jawab mereka. (Harry J. Van Buren, 2019).

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Peran *end child prostitution, child phornography and trafficking of children for sexual purpose (ECPAT)* dalam menangani kasus *child trafficking online* di Vietnam”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana upaya yang dilakukan *End Child Prostitution, Child Phornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose (ECPAT)* dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking Online di Vietnam?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani permasalahan Child Trafficking Online di Vietnam tahun 2019-2022.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani Child Trafficking Online di Vietnam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian ECPAT dan Pemerintah Vietnam dalam permasalahan Child Trafficking di Vietnam.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai permasalahan Child Trafficking di Vietnam dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian ECPAT dalam menanganinya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.